

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi yang dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Dimana akuntansi keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintahan, karena akuntansi keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala

urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun). Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU No 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah : Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntansi Pemerintahan tidak berbeda dengan Akuntansi Umum. Kuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi yaitu analisis

transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, dan laporan keuangan.

Jurnal merupakan suatu media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Jurnal dibedakan menjadi dua, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi saja. Contoh jurnal khusus adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.

Buku besar adalah sebuah buku berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (account). Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang, dan ekuitas dana. Proses memasukkan rekening-rekening dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang disebut dengan *posting*. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing rekening yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara periodik (mingguan atau bulanan). Buku besar merupakan catatan akuntansi permanent yang terakhir, sehingga dikenal dengan *the books of final entry*.

Prosedur perjurnalan dan posting dilakukan selama satu periode akuntansi. Prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening diambil angkanya dari saldo terakhir yang ada di setiap rekening.

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun guna menghasilkan pengaitan yang

tepat antara pendapatan dengan belanja/biaya. Penyesuaian dibutuhkan ketika terdapat transaksi yang memengaruhi pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran.

Prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Apabila tahap penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 (ayat 6) pengelolaan keuangan desa adalah : Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa : Anggaran, Buku kas, Buku pajak, Buku bank, Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tersebut disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes Kecamatan Singingi Hilir yang salah satunya dialokasi dan dikelola oleh Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam struktur pemerintahan desa, satuan kerja perangkat desa (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan

atau transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja perangkat desa. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Bendahara desa yang merupakan bagian dari PTPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan pada akhir periode dari catatan tersebut bendahara menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Proses pencatatan pada Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dimulai dari transaksi dicatat terlebih dahulu kedalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Bank Desa. Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi juga membuat pelaporan berupa laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa per Triwulanan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

BKU terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, untuk menginformasikan identitas satuan kerja, identitas penggunaan anggaran, identitas bendahara pengeluaran, tanda tangan pengguna anggaran, dan tanda tangan bendahara pengeluaran. Kedua, untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan transaksi lainnya yang mempengaruhi kas yang dikelola bendahara pengeluaran.

Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan pada pada periode dimana pendapatan tersebut diperoleh dan untuk mengakui belanja/biaya pada periode dimana barang dan jasa yang berkaitan dipergunakan.

Masalah lain yang ditemukan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dimana pada saat terjadi penerimaan atau pembelian atas aktiva Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak mencatat transaksi tersebut kedalam jurnal. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat kedalam jurnal umum harian yang dibuat sebagai jurnal pendamping untuk transaksi-transaksi realisasi anggaran yang mempengaruhi akun-akun di neraca.

Seharusnya semua transaksi atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Buku jurnal yang seharusnya digunakan oleh Desa Beringin Jaya meliputi buku jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas dari identitas satuan kerja, kode rekening yang di debit/kredit, nama rekening yang di debit/kredit, dan tanda tangan PPK-SKPD.

Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Neraca) tetapi aset tetap bersaldo Rp. 0,- (lampiran 4). Adapun aset tetap yang dimiliki Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kantor desa, gelanggang olahraga (GOR), pasar, posyandu, kantor BUMDes, PNPM (PAM Simas), sekolah taman kanak-kanak (TK), sekolah PAUD, madrasah diniyah awaliyah (MDA), DAM, printer dan laptop.

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah penerapan akuntansi dalam penulisan proposal ini

berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di Pemerintahan Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang desa dalam menjalankan dan menerapkan akuntansi keuangan di Desa.

b. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu akuntansi keuangan di Desa Beringin Jaya.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya pembahasan maka berikut ini akan disajikan gambaran ringkas sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi 6 bab berikut ini:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori meliputi pengertian akuntansi, otonomi desa, sistem akuntansi, tujuan akuntansi desa, siklus akuntansi desa, persamaan dan perbedaan akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi perusahaan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara detail tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisikan tentang gambaran umum desa yang diteliti, struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan desa.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan pada desa yakni tentang pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan, dan pengeluaran, penyajian laporan arus kas, dan penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan.

